



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

## KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

### RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

### REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)  
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Yusuf Maulana, SAP

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018</b> Moch. Nurhasim	129–142
• <b>Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal</b> Lili Romli	143–160
• <b>Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017</b> Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• <b>Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)</b> Firman Noor	179–196
• <b>Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019</b> Ridho Imawan Hanafi	197–213
• <b>Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi</b> Sri Budi Eko Wardani	215–231
• <b>Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia</b> Sri Yanuarti	233–248
• <b>Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018</b> M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
<b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung</b> Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• <b>Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi</b> Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
<b>Review Buku</b>	
• <b>Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik</b> Mouliza K.D Sweinstani	307–317
<b>Tentang Penulis</b>	319–320
<b>Pedoman Penulisan</b>	321–325

## CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

## RESUME PENELITIAN

### MODAL, STRATEGI DAN JARINGAN PEREMPUAN POLITISI DALAM KANDIDASI PILKADA LANGSUNG<sup>1</sup>

#### *CAPITAL, STRATEGY AND WOMEN POLITICAL NETWORK IN DIRECT ELECTION CANDIDATION*

**Kurniawati Hastuti Dewi, Atika Nur Kusumaningtyas, Esty Ekawati,  
Syafuan Rozi Soebhan**

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
email: kurniawati.dewi@yahoo.com

Diterima: 3 Oktober 2018; Direvisi: 21 Oktober 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

#### *Abstract*

*This research specifically highlights importancy of the candidacy stage especially through political party channels, as strategic entry point that must be passed by female politician to compete in direct local elections. Through an in-depth analysis of the two female politicians in Grobogan and East Lampung, this research underlines the importance of three things: capital in the form of individual and social capital, strategies, and networks that politicians must have and be able to play to be nominated in direct local elections.*

**Keywords:** *capital, network, candidacy, direct local election*

#### **Abstrak**

Kajian ini secara khusus menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

**Kata Kunci:** modal, jaringan, kandidasi, pilkada langsung

---

<sup>1</sup> Substansi pokok di dalam tulisan ini sudah diterbitkan dalam Kurniawati Hastuti Dewi (ed), *Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2018)

## Pendahuluan

Kandidasi merupakan salah satu proses kunci bagi politisi, termasuk perempuan untuk masuk sebagai calon legislatif atau sebagai calon kepala daerah. Apalagi mengingat kecenderungan tidak transparannya proses seleksi dan kandidasi para politisi perempuan. Sebagai contoh, kajian tim peneliti Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga (2011) meneliti 22 perempuan yang diusung parpol atau perseorangan sebagai kandidat bupati/walikota maupun wakil bupati dalam Pilkada langsung di Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Beberapa kesimpulan kajian tersebut antara lain bahwa sebagian besar perempuan maju dalam proses kandidasi melalui kendaraan partai atau gabungan partai, dan tidak ada prosedur yang transparan, *predictable*, dan membuka ruang afirmasi untuk peran serta perempuan.<sup>2</sup> Selain itu, hasil kajian Pusat Kajian Politik LIPI dan IMD menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih cenderung mengikuti atau ditentukan faktor-faktor primordial seperti agama, kesamaan daerah, kedekatan dan kesetiaan dengan pimpinan teras partai.<sup>3</sup> Melalui beberapa kajian tersebut, dapat ditarik dua poin penting: *pertama*, kandidasi adalah titik pertarungan krusial bagi seorang perempuan politisi, termasuk kader partai politik; mengingat pencalonan melalui partai politik merupakan salah satu jalur penting kandidasi selain dari jalur perseorangan. *Kedua*, signifikansi jaringan aktor-aktor yang digunakan oleh perempuan politisi dalam menembus tahap kandidasi tersebut.

Sudah banyak kajian yang menyorot mengenai pentingnya jaringan aktor-aktor khususnya dalam struktur partai politik yang dibutuhkan untuk kemenangan seorang perempuan calon anggota legislatif. Sebagai contoh, Binny Buchori, calon legislatif perempuan partai Golkar yang gagal pada Pemilu tahun 2009 mengatakan bahwa salah satu kunci kegagalannya adalah tidak memiliki jaringan aktor-aktor yang berada di dalam

struktur partai politik Golkar, yang berdampak pada sulitnya menggunakan seluruh mesin partai politik.<sup>4</sup> Hal ini dikonfirmasi oleh Nurul Arifin caleg partai Golkar yang juga pengurus pusat partai Golkar yang sukses memenangkan Pemilu legislatif tahun 2009. Nurul mengatakan bahwa salah satu kunci suksesnya adalah mampu masuk ke dalam kepengurusan partai politik dan jaringan perempuan pengurus partai sehingga memungkinkannya untuk menggunakan infrastruktur partai hingga ke tingkat dusun.<sup>5</sup> Pentingnya menjalin jaringan dengan para aktor di dalam partai politik juga dikemukakan oleh Lilis Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang gagal pada Pemilu 2009. Lilis mengatakan salah satu kunci kegagalannya adalah dia berangkat menjadi caleg bukan dari struktur atau kader partai PKS sehingga struktur partai tidak berpihak kepadanya.<sup>6</sup> Kasus-kasus pada ranah Pemilu legislatif tersebut dapat memberikan gambaran pentingnya seorang politisi perempuan memiliki jaringan aktor-aktor dalam struktur partai politik, tidak terkecuali dalam kandidasi seorang kepala daerah.

Mengingat krusialnya persoalan kandidasi perempuan politisi dan jaringan yang mereka gunakan, maka tim Gender dan Politik Pusat Kajian Politik LIPI melakukan kajian mengenai modal, strategi dan jaringan perempuan politisi dalam kandidasi di Pilkada langsung. Meskipun sangat penting, namun ternyata hal ini belum banyak dikaji. Sebagian besar kajian mengenai kandidasi sudah dilakukan pada pemilihan perempuan anggota legislatif seperti; Puskapol (2013),<sup>7</sup> rumahpemilu.org (2013),<sup>8</sup> Perludem

<sup>2</sup> Tim Peneliti Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), "Perempuan dalam Pemilu: Kajian tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara", (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011), hlm. 348.

<sup>3</sup> Syamsuddin Haris, ed), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. xvii.

<sup>4</sup> Laporan Utama, "Transkrip Diskusi Representasi Politik Perempuan: Sekadar Warna atau Turut Mewarnai", *Jurnal Sosial Demokrasi*, Edisi 6, Nomor 2 (Juni - Agustus 2009), hlm. 23.

<sup>5</sup> Laporan Utama, "Transkrip Diskusi Representasi...", hlm. 21.

<sup>6</sup> Laporan Utama, "Transkrip Diskusi Representasi...", hlm. 27.

<sup>7</sup> Sri Budi Eko Wardani, Yolanda Panjaitan, Wawan Ichwanuddin, et.al, *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009* (Jakarta: Puskapol Fisip UI, 2013).

<sup>8</sup> rumahpemilu.org, *Peta Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2014: Perempuan dalam Partai Politik, Pemilu, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif* (Jakarta: rumahpemilu.org atas dukungan Perludem, 2013).



(2014),<sup>9</sup> Pusat Kajian Politik LIPI (2012),<sup>10</sup> Ekawati (2012).<sup>11</sup> Telah ada kajian terdahulu mengenai jaringan yang dipakai perempuan politisi mulai dari kandidasi sampai dengan kemenangan pada Pilkada langsung seperti dilakukan (Dewi, 2015).<sup>12</sup> Namun studi lanjutan setelah itu, dengan menggunakan metodologi kajian baru, belum ada. Maka diperlukan kajian lanjutan untuk semakin memahami mengenai model jaringan perempuan politisi dalam kandidasi di Pilkada langsung.

Kajian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, modal (individu dan sosial) seperti apa yang dimiliki politisi perempuan, khususnya yang berasal dari kader parpol, sehingga membuatnya dipilih oleh parpol menjadi bakal calon kepala daerah?. *Kedua*, strategi seperti apa yang dimainkan oleh perempuan politisi kader parpol tersebut untuk menembus elit partai politik dalam kandidasi sehingga dirinya berhasil menjadi calon kepala daerah? *Ketiga*, jaringan seperti apa yang berhasil digunakan perempuan dalam kandidasi?.

Jika dilihat dari latar belakang, dari 24 perempuan kepala daerah yang menangkan Pilkada langsung tahun 2015 dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, perempuan kader partai politik (parpol). Terdapat 12 dari 24 (50 %) perempuan kepala daerah terpilih pada Pilkada langsung 2015 adalah kader parpol.<sup>13</sup> *Kedua*, perempuan dengan latar belakang

kekerabatan saja. Terdapat 11 dari 24 (45.83%) perempuan yang merupakan bagian dari jaringan kekerabatan (suami atau ayahnya adalah politisi berpengaruh).<sup>14</sup> Tim Gender dan Politik Pusat Kajian Politik LIPI, pada tahun 2016 telah menganalisis kasus-kasus perempuan kepala daerah dengan ikatan keluarga (*familial ties*) (ada juga yang menggunakan istilah kekerabatan) dan kontribusinya terhadap demokratisasi lokal. *Ketiga*, perempuan kader partai dan memiliki hubungan kekerabatan.

Pada kajian ini, tim mengambil dua kasus perempuan politisi kader parpol yang kemudian berhasil menembus kandidasi dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah oleh partainya masing-masing, dan menang dalam Pilkada langsung tahun 2015. Keduanya adalah Sri Sumarni di Kabupaten Grobogan dan Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur. Sri Sumarni adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berkarir dari bawah, menjadi anggota DPRD Grobogan, kemudian menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Grobogan, dan akhirnya berhasil menjadi Bupati Grobogan (2015-2020). Sementara itu, Chusnunia Chalim adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merintis karir dari bawah, menjadi Staf Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB, dan akhirnya berhasil menjadi Bupati Lampung Timur (2015-2020). Kedua perempuan politisi yang dipilih adalah kader parpol, dengan maksud agar diperoleh analisis utuh mengenai perjalanan karir politisi perempuan selama bertahun-tahun di dalam PDIP dan PKB, apa saja modal individu dan sosial yang dimilikinya, bagaimana proses memperoleh kepercayaan dari elit-elit parpol, dan yang paling penting adalah memperoleh gambaran mengenai jaringan yang dipakai dalam kandidasi pada Pilkada langsung di Grobogan dan Lampung Timur tahun 2015.

Untuk menganalisis modal, strategi serta jaringan perempuan politisi dalam kandidasi Pilkada langsung, kajian ini akan mempergunakan (*Social Networks Analysis*, SNA; selanjutnya

---

<sup>9</sup> Lia Wulandari, Khoirunnisa Agustyati, et.al, *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014* (Jakarta: Perludem dan The Asia Foundation, 2014).

<sup>10</sup> Pusat Penelitian Politik, *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Loka*. (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI & Konrad Adenauer Stiftung, 2012).

<sup>11</sup> Tentang proses rekrutmen calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2009. Lihat: Esty Ekawati, *Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2009*. Tesis Master, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

<sup>12</sup> Kurniawati Hastuti Dewi, *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia* (Singapore: NUS Press and Kyoto University Press, 2015).

<sup>13</sup> Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), "Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Perempuan",

---

Jakarta, 20 Desember 2015.

<sup>14</sup> Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), "Jalan Terjal Perempuan...",

pemakaian kata “analisis jaringan sosial” atau “SNA” akan dipakai dalam kajian ini yang merujuk pada hal yang sama). Penggunaan SNA untuk memotret dan menganalisis jaringan perempuan dalam kondisi Pilkada langsung ini adalah yang pertama. Jadi, dari segi metodologi kajian ini menawarkan sebuah kebaruan. Analisis dengan SNA dibingkai dalam perspektif gender yang didalamnya akan menguraikan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah struktur sosial, kultural, politik.<sup>15</sup> Adapun kerangka pikir kajian adalah sebagai berikut.

## Kerangka Pikir Kajian

### *Kandidasi Calon Kepala Daerah*

Partai politik (parpol) adalah salah satu pilar penting demokrasi. Salah satu fungsi klasik parpol adalah melakukan rekrutmen. Rekrutmen politik secara khusus merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan

eksekutif.<sup>16</sup> Pippa Norris (2006) mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen politik (khususnya legislatif) yaitu: (i) “*certification*” (*sertifikasi*), merupakan proses yang menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk dijadikan calon; (ii) “*nomination*” (*nominasi*), yang melibatkan pasokan orang-orang yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dicalonkan, (iii) “*election*” (pemilihan) or “*election stage*” (tahap pemilihan) merupakan langkah terakhir yang menentukan yakni siapa yang akan memenangkan pemilihan legislatif.<sup>17</sup> Menurut Hazan & Rahat (2002), nominasi merupakan tahap seleksi kandidat yang paling penting dalam proses rekrutmen politik. Yakni proses di mana partai politik memutuskan satu diantara orang-orang yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan/didukung menjadi kandidat.<sup>18</sup> Tim menggunakan istilah kandidasi untuk menggambarkan proses nominasi dan menurunkannya menjadi tiga tahapan yakni; penjaringan, penyaringan dan penetapan. Dalam kajian ini, kandidasi dalam kerangka jaringan, didefinisikan sebagai: proses pencalonan secara resmi calon kepala daerah sesuai ketentuan UU No. 8/2015 pasal 39, di mana analisis tim akan difokuskan pada bagaimana jaringan elit parpol yang berpengaruh dan menentukan dalam kandidasi (meliputi tahap penjaringan, penyaringan, dan penetapan) bakal calon kepala daerah, untuk menjadi calon kepala daerah yang diusulkan oleh PKB dan PDIP dalam Pilkada langsung, khususnya di Kabupaten Lampung Timur dan Grobogan pada Pilkada langsung tahun 2015.

<sup>15</sup> Jika dilihat lebih mendalam, upaya ilmuwan feminis dalam bidang ilmu politik (*feminist politics*) untuk melakukan dekonstruksi terhadap dinamika rekrutmen politik dalam hal ini seleksi kandidat yang lazimnya menggunakan kerangka ‘Supply and Demand’ model telah terdokumentasikan dengan baik. Sebagai contoh: *Pertama*, *feminist political science* (FPS) yang pada dasarnya menggarisbawahi tiga hal penting yaitu upaya memperluas definisi politik, tidak hanya menyangkut proses formal berkaitan dengan pemerintahan dan Pemilu tetapi juga tindakan informal seperti gerakan sosial; memasukkan gender sebagai konsep (relasi gender) dan sebagai kategori analisis, dan mengupayakan pemahaman-pemahaman terdalam untuk mendorong perubahan. Lihat Mona Lena Krook and Fiona Mackay, “Introduction: Gender, Politics, and Institutions” dalam *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*, ed. Mona Lena Krook and Fiona Mackay (New York: Palgrave Macmillan, 2011). *Kedua*, pendekatan “*feminist institutionalist*” (*feminist institutionalist approach*) yang berupaya mengeksplorasi dinamika gender dari lembaga rekrutment politik. Kritik mereka intinya adalah bahwa analisis politik rekrutment dengan “Supply and Demand” model saja tidak cukup mampu menjelaskan mengapa masih ada persoalan rendahnya keterwakilan perempuan di setiap negara. Oleh karena itu, *feminist institutionalist theory* menggariskan setidaknya tiga kategori gender kelembagaan (*three categories of gendered institutions*) yang harus diperhatikan dalam analisis seleksi kandidat yaitu, *systemic institutions*, *practical (formal and informal practice of elites, procedures and criteria to select candidates)*, dan *normative (formal and informal principles)*. Lihat lebih detail di Meryl Kenny, “Gender and Institutions of Political Recruitment: Candidate Selection in Post-Devolution Scotland”, dalam *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*, ed. Mona Lena Krook and Fiona Mackay (New York: Palgrave Macmillan, 2011); dan Mona Lena Krook, “Beyond Supply and Demand: A Feminist-institutionalist Theory of Candidate Selection”, *Political Research Quarterly*, vol. 63, no. 4 (2010): 707-720.

<sup>16</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik: teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarims, 2011), hlm. 91, sebagaimana dikutip dari Tim Pusat Penelitian Politik LIPI, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia* (Jakarta: KPK RI bekerjasama dengan P2Politik LIPI, 2016), hlm 9.

<sup>17</sup> Pippa Norris, “Recruitment”, dalam *Handbook Partai Politik*, ed. Richard S. Katz dan William Crotty, (edisi terjemahan) (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), hlm. 148-149.

<sup>18</sup> Lihat: Reuven Y. Hazan, “Candidate Selection” dalam *Comparing Democracies 2*, ed. Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi dan Pippa Norris (London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Ltd, 2002), hlm.109

## ***Strategi Perempuan Politisi Menembus Elit Parpol dalam Kandidasi***

Beberapa ciri penting kajian dengan perspektif gender adalah: (i) menjelaskan adanya relasi gender/relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki (individu maupun kelompok) dalam sebuah konteks atau struktur sosial, (ii) menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan untuk membangun analisis dan narasi. “*The personal is political*” menjadi salah satu pegangan kajian ini untuk mengoreksi kecenderungan kajian politik klasik yang melihat relasi kuasa hanya terjadi dalam ranah publik, antara negara dan rakyatnya, berorientasi pada kekuasaan, yang terwujud dalam struktur parlemen, kabinet, partai politik, dan lain-lain.<sup>19</sup> Namun, dalam kacamata para *feminist politics* atau kajian berperspektif gender, politik dilihat sebagai relasi laki-laki dan perempuan. Dalam kajian ini yang dimaksud *personal is political* adalah bagaimana kedua perempuan politisi tersebut menggunakan modal individu dan sosial dalam menembus kandidasi.

Dalam konteks inilah, kajian ini mengasumsikan: *pertama*, terjadi dominasi dalam struktur jaringan elit partai politik (PDIP dan PKB) dalam kandidasi kedua perempuan politisi; *kedua*, dominasi laki-laki dalam struktur jaringan elit partai politik itu juga menyiratkan relasi gender yang tidak seimbang di mana para elit parpol laki-laki yang mendominasi dan berpengaruh dalam kandidasi, akan cenderung mengganjal dan mempersulit politisi perempuan untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Pentingnya aspek gender, dalam hal ini preferensi laki-laki sebagai mayoritas elit partai politik yang menguasai proses seleksi, juga terjadi di luar negeri. Kajian Christine Cheng and Margit Tavits, mengenai adanya pengaruh informal dalam seleksi perempuan kandidat anggota legislatif dalam Pemilu nasional Kanada tahun 2004 dan 2006 memperlihatkan bahwa perempuan kandidat anggota legislatif cenderung akan dinominasikan, ketika elit paprol yang melakukan seleksi (*gatekeeper*) dalam hal ini pemimpin parpol lokal, adalah seorang

perempuan daripada laki-laki.<sup>20</sup> Kajian ini akan menganalisis sejauhmana kedua asumsi itu bekerja dalam kasus kedua perempuan politisi yang diteliti. Melihat kenyataan bahwa kedua perempuan politisi yang diteliti dalam kajian ini berhasil menembus kandidasi, maka justru akan sangat menarik melihat bagaimana strategi kedua perempuan politisi tersebut mampu menembus jaringan elit parpol dalam kandidasi pada Pilkada langsung pada tahun 2015.

Dalam kajian ini, “strategi” dimaknai sebagai kapasitas perempuan politisi sebagai subyek untuk menggunakan modal sosial (“*social capital*”) yang dimilikinya untuk menembus elit partai politik (PDIP dan PKB) dalam proses kandidasi (melalui tiga tahap penjaringan, penyaringan, penetapan, akan dijelaskan dalam bagian berikutnya) pada Pilkada langsung tahun 2015. Mengapa modal sosial ini menjadi titik perhatian penting?.

Untuk memahami mengapa modal sosial ini menjadi titik analisis penting untuk melihat strategi kedua perempuan politisi, maka perlu dijelaskan konsep “*capital*” atau modal yang lazimnya dimiliki seseorang dalam sebuah kompetisi, termasuk kompetisi politik. Secara teori, menurut Lin (2004) yang didasari teori klasik Marx, kapital adalah investasi sumber daya dengan mengharapkan suatu hasil yang dapat dipergunakan di dalam pasar (“*investment of resources with expected returns in the marketplace*”).<sup>21</sup> Lin (2004) menjelaskan evolusi dari teori kapital klasik tersebut menjadi apa yang disebut “*neo-capital theory*” yang mengategorikan berbagai komponen-komponen seperti kapital manusia (“*human capital*”), kapital budaya (“*cultural capital*”), dan kapital sosial (“*social capital*”).<sup>22</sup> Lin (2001) mendefinisikan “*social capital*” atau modal sosial sebagai investasi dalam hubungan sosial dengan mengharapkan keuntungan di

<sup>19</sup> Lihat Misiyah, “Pengalaman Perempuan: Sumber Pengetahuan yang Membebaskan”, *Jurnal Perempuan*, No. 48 (2006), hlm. 46.

<sup>20</sup> Cheng dan Tavits, menyimpulkan pentingnya memperhatikan faktor informal untuk memahami persoalan rendahnya partisipasi politik perempuan. Lihat: Christine Cheng and Margit Tavits, “Informal Influences in Selecting Female Political Candidates”, *Political Research Quarterly*, vol. 64, no. 2 (2011): 460-471.

<sup>21</sup> Nan Lin, *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm 3.

<sup>22</sup> Nan Lin, *Social Capital...*, hlm. 8.

dalam pasar (“investment in social relations with expected returns in the marketplace”)<sup>23</sup>. Modal sosial, masih menurut Lin (2004) menekankan hubungan sosial (“social relations”) berupa akses ke dan penggunaan sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial (“social networks”).<sup>24</sup> Tidak jauh berbeda dengan Lin, Ronald S. Burt (1995) memberikan catatan bahwa dalam arena atau iklim kompetisi (baik kompetisi ekonomi ataupun politik), seorang pemain (“player”)--dalam kajian ini adalah politisi--setidaknya harus memiliki tiga modal atau “capital” yaitu pertama, modal finansial (“financial capital”) berupa uang atau modal material lainnya; kedua, modal manusia (“human capital”) berupa kualitas seseorang seperti kecerdasan, ketrampilan, penampilan, kharisma; ketiga, modal sosial (“social capital”) berupa hubungan dengan teman, kolega atau orang tertentu di mana hubungan itu memberikan kesempatan kepada pemain (politisi) untuk menggunakan atau mengubah modal finansial dan modal manusia yang dimilikinya menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan.<sup>25</sup> Jadi, apabila modal finansial dan modal manusia lebih bersifat individu, maka modal sosial ini tidak mungkin terbentuk jika tidak ada relasi atau kerja sama dengan orang lain. Begitu krusialnya modal sosial ini, Burt (1995) sampai mengatakan bahwa modal sosial adalah penentu akhir kesuksesan sebuah kompetisi (“social capital is the final arbiter of competitive success”).<sup>26</sup>

Melalui elaborasi Lin dan Burt mengenai “capital” atau modal, maka kajian ini akan memahami strategi para perempuan politisi dalam menembus elit parpol dalam kandidasi pada Pilkada langsung 2015 dengan memfokuskan pada: *pertama*, akan difahami dulu “modal individu” yang merujuk pada modal apa saja yang dimiliki secara personal oleh masing-masing perempuan politisi tersebut (latar belakang keluarga, pendidikan, kemampuan

ekonomi, riwayat karir politik, motivasi) yang kemudian membuat mereka dicalonkan, ataupun sebaliknya membuat mereka percaya diri untuk mencalonkan diri. Jika memakai istilah Lin dan Burt, maka “modal individu” ini mencakup modal finansial dan modal manusia. *Kedua*, setelah faham mengenai “modal individu” masing-masing perempuan politisi, maka hal yang paling penting adalah melihat strategi mereka dalam menggunakan modal sosial yaitu bagaimana mereka menggunakan hubungan dengan teman, kolega, dan kontak-kontak lainnya di sekitarnya yang memiliki akses ke sumber daya strategis, di mana dalam hubungan tersebut, kedua perempuan politisi mampu mengambil keuntungan.

Dalam konteks strategi dalam menggunakan modal sosial, kajian ini mengategorikan strategi menjadi tiga. *Pertama*, strategi menggunakan modal sosial dengan berperan sebagai apa yang disebut oleh Burt (1995) “tertius gaudens” atau “‘the third who benefits’ (Burt),<sup>27</sup> atas dasar karya George Simmel (1992), merujuk pada keadaan di mana seseorang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi di antara dua orang atau lebih dalam sebuah relasi.<sup>28</sup> Orientasi seorang “tertius gaudens” adalah berperan selayaknya broker atau perantara di antara dua aktor (pihak) atau lebih, di mana yang bersangkutan dapat memainkan peran menjadi semacam penghubung dari aktor yang saling berseteru itu, demi keuntungan pribadinya.

*Kedua*, strategi sebagai “tertius iungens” diperkenalkan oleh Obstfeld (2005) dan mengatakan bahwa pihak ketiga tidak hanya memisahkan aktor sebagaimana “tertius gaudens” tetapi bisa juga menyatukan atau menghubungkan individu atau aktor yang semula terpisah atau tidak saling berhubungan dalam sebuah jaringan sosial, atau memfasilitasi koordinasi atau kerja sama baru diantara individu yang sudah saling kenal.<sup>29</sup> *Ketiga*, strategi yang menempatkan

<sup>23</sup> Nan Lin, *Social Capital...*, hlm. 19.

<sup>24</sup> Nan Lin, “Building a Network Theory of Social Capital” dalam *Social Capital: Theory and Research*, ed. Nan Lin, Karen Cook, Ronald S. Burt (New York: Aldine De Gruyter, 2001), hlm. 5.

<sup>25</sup> Ronald S. Burt, *Structural Holes: The Social Structure of Competition* (USA: Harvard University Press, 1995), hlm. 8-9.

<sup>26</sup> Ronald S. Burt, *Structural Holes...*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Ronald S. Burt, *Brokerage & Closure: An Introduction to Social Capital* (New York, USA: Oxford University Press, 2005), hlm.. 17.

<sup>28</sup> Ronald S. Burt, *Structural Holes: The Social Structure of Competition...*, hlm. 31.

<sup>29</sup> David Obstfeld, “Social Networks, The Tertius Iungens Orientation, and Involvement in Innovation”, *Administrative Science Quarterly* 50, (2005), 3.

“tertius gaudens” maupun “tertius iungens” bukan sebagai pilihan tunggal, tetapi aktor secara fleksibel dapat melakukan “tertius gaudens” ataupun “tertius iungens” sesuai kebutuhan sebagaimana dikemukakan Lingo and O’Mahony (2010).<sup>30</sup>

### ***Teori Elit untuk Menjelaskan Aktor-Aktor dalam Struktur Partai Politik***

Harold D. Lasswell berkontribusi besar dalam perkembangan analisis elit yang menyatakan bahwa elit adalah kelompok/golongan kecil yang terdiri atas orang-orang (mereka) yang berhasil, yang mencapai kedudukan dominan dalam masyarakat karena nilai yang dibentuk sehingga dihargai tinggi oleh masyarakat. Secara sederhana elit adalah yang berpengaruh.<sup>31</sup> Kajian mengenai elit juga dibahas oleh Gaetano Mosca (1939) yang membagi masyarakat dalam dua kelas yakni: *pertama*, kelas yang berkuasa atau “kelas penguasa”, dan *kedua*, kelas yang dikuasai berjumlah banyak, diperintah dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih legal.<sup>32</sup> Vilfredo Pareto (1935) kemudian menyebutkan istilah “kelas penguasa” Mosca menjadi istilah elit, dengan membedakan elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit non-memerintah (*non-governing elite*); Pareto percaya bahwa dalam masyarakat ada sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas dan diperlukan kehadirannya dalam kekuasaan sosial politik yang disebut dengan “elit”.<sup>33</sup> Suzanne Keller (1995) kemudian memperkenalkan istilah *elit penentu*, yakni mereka yang pertimbangan, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya mempunyai akibat-akibat

penting dan menentukan untuk kebanyakan anggota masyarakat.<sup>34</sup> Elit penentu tersebut meliputi pemimpin politik, ekonomi, militer, moral, budaya dan ilmu pengetahuan.<sup>35</sup>

Dalam konteks kajian ini, teori elit membantu untuk menganalisis mengenai aktor-aktor mana saja yang akan dianalisis dalam struktur jaringan perempuan politisi yang terbentuk dalam kansidasi. Yang disebut dengan aktor formal adalah elit partai politik yang berperan dalam proses kandidasi baik aktor yang tercatat sebagai tim seleksi maupun tidak, namun memiliki pengaruh yang signifikan dalam kandidasi. Sedangkan aktor informal adalah elit diluar partai politik yang memiliki peran dan pengaruh dalam kandidasi, misalnya *Kyai*, *Nyai*, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat.

Kajian ini merupakan kombinasi antara studi kualitatif dan kuantitatif (dengan SNA). Pengambilan data dan wawancara lapangan telah dilakukan di Kabupaten Grobogan pada 12-24 April 2017, dan di Lampung Timur pada 4-16 April 2017. Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu oleh sebuah pedoman wawancara terstruktur, terhadap tim kedua perempuan kepala daerah. Tim peneliti berhasil menemui dan mewawancarai Bupati Grobogan Sri Sumarni di rumah dinas pendopo Kabupaten Grobogan pada Kamis, 20 April 2017, dan wawancara Chusnunia Chalim di di Sukadana, 22 September 2017. Total, tim berhasil mewawancarai 29 orang elit parpol PDIP (DPC PDIP Grobogan, Jawa Tengah, dan nasional) dan 19 orang elit PKB di semua tingkatan. Selain itu, untuk memperoleh masukan dari kalangan akademisi dan praktisi, tim

<sup>30</sup> Elizabeth Long Lingo and Siobhan O’Mahony, “Nexus Work: Brokerage on Creative Projects”, *Administrative Science Quarterly* 55, (2010): 47-81.

<sup>31</sup> Lihat: Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.72-73 dan Ichlasul Amal dan Budi Winarno, *Metodologi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM), hlm.203.

<sup>32</sup> Gaetano Mosca, “The Rulling Class” dalam *Elite dan Masyarakat*, ed. T.B Bottomore (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hlm.4

<sup>33</sup> Vilfredo Pareto, “The Main and Society” dalam *Elite dan Masyarakat*, ed. T.B Bottomore (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hlm.2

<sup>34</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kekompok Elite: Peranan Elite Penentu Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 28

<sup>35</sup> Lihat: Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm.75

**Tabel 1.** Kondisi Sosio-Politik dan Ekonomi di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Lampung Timur

<b>Sri Sumarni di Grobogan</b>	<b>Chusnunia Chalim di Lampung Timur</b>
<b>(i) Konfigurasi Politik</b>	
Diusung oleh PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014	Diusung oleh PKB sebagai partai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2014
<b>(ii) Sosiologis</b>	
Basis santri, khususnya NU	Mayoritas penduduk merupakan warga NU
<b>(iii) Ekonomi</b>	
Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian (56%)	Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian

Sumber: dibuat oleh penulis

menyelenggarakan dua kali diskusi terfokus pada Maret,<sup>36</sup> Juli<sup>37</sup>, dan Agustus<sup>38</sup> 2017 di Jakarta.

Sementara itu, metode kuantitatif dengan SNA digunakan dengan cara mengolah semua data yang telah masuk dalam kuesioner yang dibuat oleh tim peneliti dengan software UCINET yang menghasilkan info grafis struktur jaringan aktor (formal dan informal) yang terbentuk dalam kandidasi Sri Sumarni di Grobogan melalui PDIP Grobogan, PDIP Jawa Tengah, dan Pusat. Demikian halnya dengan Chusnunia Chalim di PKB Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Pusat. Keterbatasan kajian menggunakan SNA adalah peneliti tidak berhasil mewawancarai semua nama aktor yang tersebut dalam jaringan. Nama-nama aktor yang terdapat dalam jaringan adalah nama-nama yang disebutkan oleh para narasumber yang diwawancarai. Idealnya, tim peneliti dapat mewawancarai semua aktor yang disebut namun karena keterbatasan waktu dan jarak maka tidak semua aktor yang disebut dalam jaringan tidak dapat diwawancarai (sejauh ini verifikasi hanya dilakukan dua lapis, idealnya bisa tiga lapis).

### Temuan dan Analisis

Kedua perempuan kepala daerah, yaitu Sri Sumarni di Grobogan dan Chusnunia Chalim

<sup>36</sup> Narasumber diskusi terfokus pada bulan Maret 2017 di P2P LIPI Jakarta, adalah SBEW, akademisi ahli perempuan dan politik dari Universitas Indonesia (UI).

<sup>37</sup> Narasumber diskusi terfokus pada bulan Juli 2017 di P2P LIPI Jakarta adalah ER, akademisi ahli analisis jaringan sosial dari UI.

<sup>38</sup> Narasumber diskusi terfokus pada bulan Agustus 2017 di P2P LIPI Jakarta adalah SBEW dan ER keduanya dosen dari UI.

di Lampung Timur, muncul dari daerah dengan kondisi sosio-politik dan ekonomi lokal yang spesifik, seperti yang terangkum dalam tabel 1 di atas.

*Pertama*, kedua perempuan kepala daerah diusung oleh partai dengan kekuatan politik besar di daerahnya. Sri Sumarni diusung oleh PDIP yang merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak di Grobogan bahkan sejak tahun 1999 hingga saat ini. Sementara, Chusnunia Chalim diusung oleh PKB yang merupakan partai peraih suara terbanyak kedua hasil Pemilu Legislatif 2014. Hal ini juga menunjukkan pola bahwa kedua perempuan kepala daerah ini muncul dengan basis politik yang kuat.

*Kedua*, sebagian besar penduduk Grobogan dan Lampung Timur adalah bagian dari warga Nahdlatul Ulama (NU). Grobogan merupakan basis santri, khususnya NU, mengingat lokasi Grobogan yang berada dekat dengan daerah pantai utara Jawa sebagai tempat awal mula penyebaran Islam di Jawa. Sri Sumarni meskipun berasal dari PDIP, namun dalam interaksi keseharian dan politik dekat dengan warga NU yang secara politis berafiliasi dengan PKB. Sementara itu, Chusnunia Chalim yang memang berasal dari PKB sangat diuntungkan dengan kondisi sosiologis bahwa mayoritas penduduk adalah warga Nahdliyin.

*Ketiga*, mayoritas penduduk di kedua daerah bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebanyak 56% penduduk Grobogan bekerja di bidang pertanian. Mereka tergabung dalam kelompok-kelompok tani yang ada di Grobogan. Kondisi ini nantinya juga menguntungkan bagi Sri Sumarni karena perjalanan karir politiknya

Tabel 2. Modal Individu Sri Sumarni dan Chusnunia Chalim

Sri Sumarni di Grobogan	Chusnunia Chalim di Lampung Timur
<b>Karir Politik</b>	
Anggota DPRD Grobogan tiga periode (2004-2009) (2009-2014) (2014-2019); ketua DPRD Grobogan (2012-2019). 4), saat ini sebagai ketua DPC PDIP Grobogan tahun 2015.	Korwil PKB Lampung, anggota DPR RI dari PKB untuk Dapil Lampung II (2009-2014) (2014-2019), saat ini sebagai wakil sekjen DPP PKB.
<b>Pendidikan</b>	
Menyelesaikan S2 di Universitas Slamet Riyadi	Menyelesaikan S3 di Malaysia
<b>Modal Individu (keluarga, keunggulan personal, kekuatan jaringan)</b>	
Asli Grobogan	Asli Lampung Timur
Keluarga: berasal dari kelas keluarga yang termasuk disegani. Ayah Sri Sumarni adalah kepala desa Karangsari, dekat dengan para petani sebelum akhirnya tahun 1965. Ibunya mengelola sawah yang luas, memiliki jiwa social tinggi, mengajarkan Sri ketrampilan sosial berinteraksi dengan para petani, dan masyarakat bawah.	Keluarga: berasal dari keluarga “darah biru”, keturunan kyai. Ayah Chusnunia Chalim adalah Kyai Chalim (ulama terkemuka di Lampung) dan cicit Kyai Ma’Sum dari Lasem (salah satu pendiri NU). Faktor “darah biru” ini sangat penting bagi seseorang yang ingin memperoleh dukungan politi luas dalam masyarakat mayoritas NU.
Keunggulan personal: memiliki ketrampilan sosial ekonomi di atas rata-rata: Manager KUD Pakis Aji, berhasil mendirikan CV Tani Jaya yaitu distributor pupuk yang sukses mendapat kepercayaan dari para petani di Grobogan.	Keunggulan personal: memiliki keterampilan sosial organisasi yang bagus: sebelum terjun ke politik, aktif berorganisasi di sayap organisasi NU dan PKB sejak masa kuliah di Perguruan Tinggi.
Kekuatan jaringan: memiliki kedekatan dengan para petani, kelompok tani yang telah dibina sejak sebelum terjun ke politik; hal ini menguntungkanny karena kemudian dia bergabung dengan PDIP yang sudah lazim dekat dengan masyarakat bawah “wong cilik” di mana memang secara riil Sri Sumarni memiliki jaringan kuat dengan masyarakat bawah termasuk para petani; memiliki banyak teman pengusaha lintas partai politik.	Kekuatan jaringan: kuat berjejaring dengan NU dan badan-badan otonomnya, termasuk salah satunya Fatayat NU.

Sumber: dibuat oleh penulis

dipengaruhi latar belakang keluarganya, terutama ayahnya yang membela kehidupan para petani. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur adalah daerah penghasil padi terbesar kedua di provinsi Lampung, setelah kabupaten Lampung Tengah.

### Modal Individu Perempuan Politisi

Untuk dapat menembus kandidasi parpol dan menjadi calon kepala daerah, perempuan politisi harus memiliki sejumlah modal individu yang menunjangnya. Tabel 2 di atas menyajikan modal-modal yang dimiliki oleh Sri Sumarni dan Chusnunia Chalim.

Sebelum maju mencalonkan diri sebagai calon bupati, kedua perempuan politisi telah memiliki sejumlah modal individu yang membuat mereka mempunyai nilai *plus* untuk muncul dan dipertimbangkan dalam kandidasi dalam Pilkada langsung 2015. Paling tidak terdapat tiga kesamaan dari keduanya. *Pertama*, karir politik. Kedua perempuan politisi dalam kajian ini sama-sama mengawali karir politiknya melalui jalur legislatif lokal maupun nasional. Sri Sumarni terpilih menjadi anggota DPRD Grobogan dari PDIP selama tiga periode (2004-2019), bahkan kemudian menjadi wakil ketua DPC PDIP Grobogan, dan menjadi ketua DPC PDIP Grobogan. Tidak jauh beda, Chusnunia

Chalim mengawali karir politik dengan menjadi anggota DPR RI dari PKB dua periode (2009 dan 2014) untuk Dapil Lampung II. Jadi, dengan menjadi anggota DPRD terlebih dahulu baik di DPRD lokal maupun nasional (namun tetap di Dapil Lampung), maka kedua perempuan politisi memiliki peluang untuk dikenal lebih luas oleh publik di daerahnya. Nama mereka perlahan dikenal dan diingat oleh publik, dan perlahan mereka memperoleh kepercayaan publik. Jadi, modal popularitas dan akseptabilitas mereka sudah konfirmasikan dalam keberhasilan menjabat anggota DPRD Grobogan lebih dari satu kali pada kasus Sri Sumarni, dan anggota DPRD RI dua kali pada kasus Chusnunia Chalim.

*Kedua*, pendidikan. Salah satu modal yang dimiliki oleh kedua perempuan politisi pada saat mencalonkan diri sebagai bupati adalah pendidikannya yang tinggi. Meskipun di awal terjunnya Sri Sumarni dalam politik pada tahun 2004 pendidikannya hanya lulusan SMA, namun ia kemudian terus belajar meningkatkan potensi dirinya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 pada tahun 2004-2008 di Universitas Muria Kudus. Tidak hanya berhenti disitu, setahun kemudian Sri kembali meneruskan pendidikan dengan menempuh jenjang S2 di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2009-2011.<sup>39</sup> Sementara itu, Chusnunia juga memiliki pendidikan yang tinggi. Ia merupakan master Ilmu Politik dari Universitas Nasional dan kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Sastra dan Sains Sosial, Universitas Malaya, Malaysia. Elemen pendidikan ini bagaimanapun juga memberikan kepercayaan diri pada keduanya.

*Kesamaan ketiga*, adalah individu khususnya keluarga, keunggulan personal dan kekuatan jaringan. Keduanya sama-sama berasal dari latar belakang keluarga yang tidak biasa. Sri Sumarni memiliki ayah seorang aktifis pembela petani dan kepala desa sehingga sejak kecil Sri telah terbiasa dengan berbagai aktifitas politik. Sementara itu, Chusnunia Chalim berasal dari keluarga “darah biru” keturunan kyai; ayahnya adalah Kyai

Chalim yang merupakan ulama terkemuka di Lampung. Chusnunia juga merupakan cicit Kyai Ma’Sum dari Lasem yang tak lain adalah salah satu pendiri NU. “Darah biru” ini menjadi faktor penting untuk memperoleh dukungan publik dari daerah dengan basis massa NU.

Keduanya juga memiliki kesamaan keunggulan personal meskipun fokusnya berbeda. Sri Sumarni unggul dengan ketrampilan sosial berinteraksi dengan masyarakat petani. Sri juga memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi karena berhasil mendirikan CV Tani Jaya yang menyediakan kebutuhan pupuk bagi para petani. Sekian lama berkecimpung dengan hal-hal terkait kebutuhan petani, khususnya pupuk, membuat Sri dengan sendirinya memiliki kedekatan yang erat dengan para petani dan kelompok tani. Jaringan tani itulah yang menjadi salah satu modal kuat yang digunakan oleh Sri dalam perjalanan karir politiknya, termasuk saat ia mencalonkan diri sebagai bupati Grobogan. Tidak ada perempuan politisi lainnya di Grobogan yang memiliki ketrampilan sosial dan ekonomi lengkap seperti Sri. Tidak berbeda jauh, Chusnunia Chalim juga memiliki keunggulan personal berupa kemampuan sosial dan organisatoris yang bagus. Chusnunia yang memang sejak kecil berada di lingkungan NU, membuatnya familiar, mempunyai dasar kepercayaan, dan berjejaring dengan NU beserta badan otonominya, seperti misalnya dengan Fatayat NU. Jaringan ini yang kemudian dipakai oleh Chusnunia saat pencalonan dirinya sebagai bupati Lampung Timur. Terlebih lagi, mayoritas penduduk Lampung Timur yang merupakan warga Nahdliyin menjadikan jaringan ini memiliki peran yang signifikan dalam kandidasi Chusnunia pada Pilkada langsung 2015.

### **Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah**

Kunci utama dalam studi jaringan adalah aktor dan relasi.<sup>40</sup> Aktor disini tidak selalu individu tapi juga bisa organisasi, instansi, perusahaan, negara dan sebagainya. Sementara

<sup>39</sup> KPUD Grobogan, “Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Grobogan atas Nama Sri Sumarni”, Agustus 2015, <http://kpu-grobogankab.go.id/2015/08/daftar-riwayat-hidup-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-grobogan/>, diakses pada 9 Oktober 2017.

<sup>40</sup> Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 5.



relasi antar aktor disebut dengan *link (edge)*. Jika aktor digambarkan dengan titik (*node*) maka *link* digambarkan dalam satu garis yang menghubungkan antar aktor.<sup>41</sup> Karakteristik studi jaringan adalah: *pertama*, fokus pada relasi yakni hubungan antara satu aktor dengan aktor lainnya (bukan atribut dari aktor);<sup>42</sup> *kedua*, menekankan pada data individu masing-masing aktor daripada agregat (seperti pada survei); *ketiga*, posisi aktor tidaklah independen tetapi ditentukan oleh relasi dengan aktor-aktor lain dalam jaringan sosial; *keempat*, aktor dan relasi antar aktor pada analisis jaringan dilihat dalam perspektif struktural, dimana posisi aktor ditentukan oleh posisi aktor lain dalam struktur, bisa aktor dengan aktor lain, aktor dengan kelompok dan juga aktor dengan sistem secara keseluruhan.<sup>43</sup> Melalui SNA ini akan diketahui siapa yang menjadi aktor sentral, yang dalam SNA terdiri dari empat kategori yaitu: *degree centrality* (sentralitas tingkatan),<sup>44</sup> *closeness centrality* (sentralitas kedekatan),<sup>45</sup> *betweenness centrality* (sentralitas keberantaraan),<sup>46</sup> *eigenvector centrality* (sentralitas eigenvektor),<sup>47</sup> dalam

---

<sup>41</sup> Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi...*, hlm.37

<sup>42</sup> Yang membedakan antara analisis jaringan dengan survei adalah tipe data dimana jaringan menekankan pada “relational data” sedangkan survey menekankan pada “attribute data” seperti pengetahuan, pendidikan, status sosial ekonomi dan lain-lain. Lihat : John Scott, *Social Network Analysis a Handbook* (London: Sage Publication, 1987), hlm. 3. <http://soc.sagepub.com/content/22/1/09.short>, diakses pada 25 November 2016.

<sup>43</sup> Barry Wellman, “Network Analysis : Some Basic Principles” dalam Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi*, hlm.10-12

<sup>44</sup> *Degree* atau tingkatan memperlihatkan popularitas aktor dalam jaringan sosial di mana *degree* atau tingkatan adalah jumlah *link* dari dan ke aktor. Lihat Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi...*, hlm. 170.

<sup>45</sup> *Closeness centrality* atau sentralitas kedekatan menggambarkan seberapa dekat aktor (*node*) dengan semua aktor lain di dalam jaringan di mana kedekatan ini diukur dari berapa langkah (*jalur/path*) seorang aktor bisa menghubungi atau dihubungi oleh aktor lain dalam jaringan. Lihat Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi*, hlm. 175.

<sup>46</sup> *Betweenness centrality* atau sentralitas keberantaraan memperlihatkan posisi seorang aktor sebagai perantara dari hubungan aktor satu dengan aktor lain dalam suatu jaringan; apakah aktor (*node*) untuk menghubungi aktor lain bisa langsung ataukah harus melewati aktor tertentu. Lihat Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi*, hlm. 180.

<sup>47</sup> *Eigenvector centrality* sentralitas Eigenvektor adalah seberapa penting orang yang mempunyai jaringan dengan aktor atau seberapa banyak jaringan yang dipunyai oleh orang/

proses kandidasi perempuan kepala daerah untuk memperoleh sebuah jaringan utuh (*complete networks*).<sup>48</sup> Dalam operasionalisasinya, tim mengidentifikasi terlebih dahulu siapa saja aktor-aktor (formal dan informal) di kedua kasus yang diketahui dan muncul (disebutkan) oleh para narasumber dalam wawancara dan ditulis dalam kuesioner. Masing-masing politisi perempuan disajikan dalam tabel 3.

---

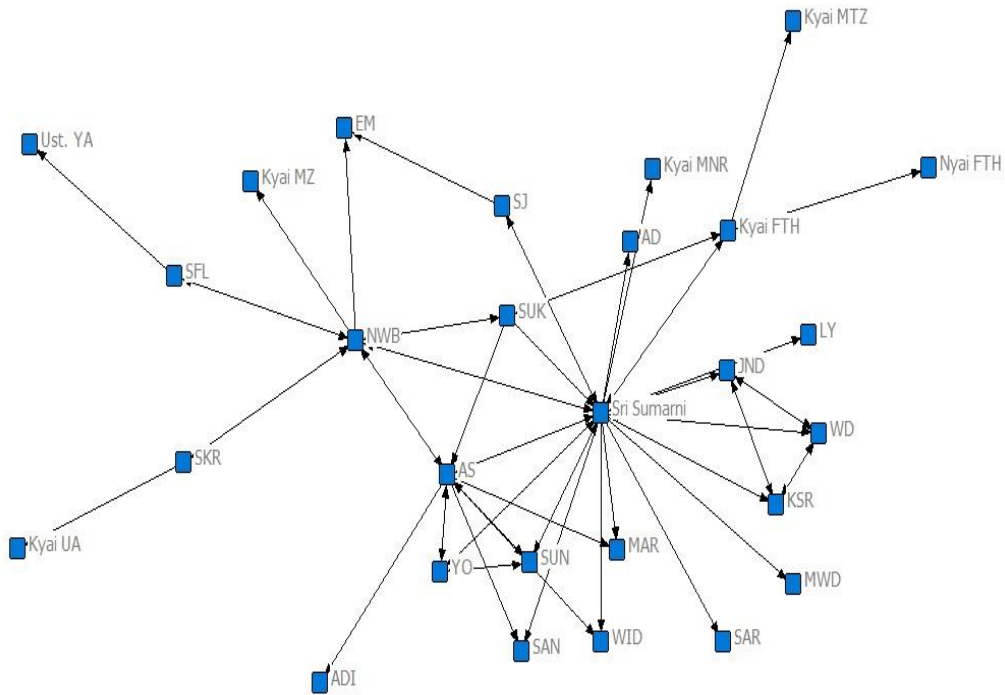
organisasi/institusi yang mempunyai relasi dengan aktor; jadi ini mengenai seberapa penting atau seberapa populer *node* yang berjaringan dengan aktor. Lihat Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi...*, hlm.182-183.

<sup>48</sup> Stanley Wasserman, “Introduction to Social Network Analysis”. [https://localgov.fsu.edu/readings\\_papers/syllabi/wasserman\\_Social%20Network%20Analysis.pdf](https://localgov.fsu.edu/readings_papers/syllabi/wasserman_Social%20Network%20Analysis.pdf). Dan lihat juga: Katherine Faust and Sean Fitzhugh, “Social Network Analysis: An Introduction”, 2012 ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research.

**Tabel 3.** Profil Aktor dalam Kandidasi Sri Sumarni pada Pilkada Langsung 2015 di Grobogan

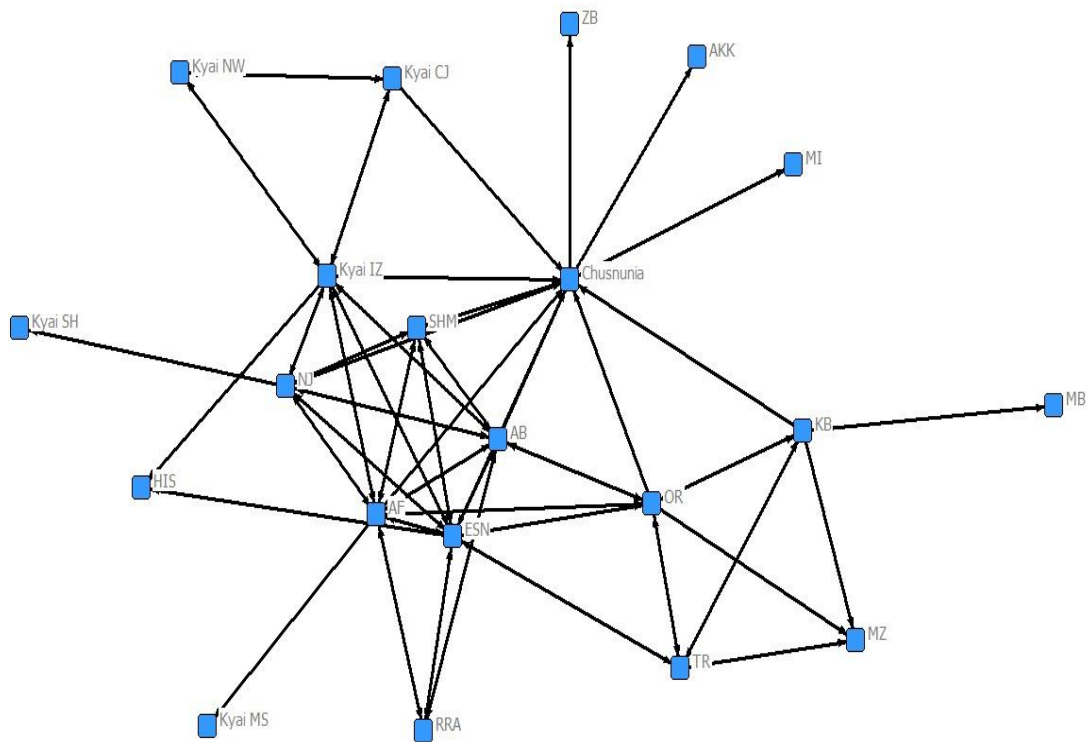
Penjaringan			
Nama Inisial	Aktor Formal	Aktor Informal	Keterangan
<b>Laki-laki</b>			
AS	✓		Sekretaris DPC PDIP Grobogan, Ketua Desk Pilkada DPC PDIP Grobogan
YO	✓		Sekretaris Desk Pilkada DPC PDIP Grobogan
SUN	✓		Wakil Ketua Desk Pilkada DPC PDIP Grobogan
NWB	✓		Ketua DPC PKB Grobogan, serta penghubung ke <i>Kyai</i> MZ
EM	✓		Sekretaris DPC PKB Grobogan
SUK	✓		Wakil Ketua DPC PKB Grobogan, serta penghubung ke <i>Kyai</i> FTH
SJ	✓		Ketua DPC Hanura Grobogan
SAR	✓		Ketua DPC PAN Grobogan
WID	✓		Ketua PAC PDIP Kec. Kedung Jati, Grobogan
SAN	✓		Ketua PAC PDIP Kec. Tanggung Harjo, Grobogan
AD	✓		Ketua PAC PDIP Kec. Gubug, Grobogan
MAR	✓		Ketua PAC PDIP Kec. Tego Wangu, Grobogan
WD		✓	Kepala Desa Kandangrejo, Grobogan
KSR		✓	Kepala Desa Taruman, Grobogan
JND		✓	Kepala Desa Penganten, Grobogan
SFL		✓	Penghubung ke Ustad Y.
SKR	✓		Ketua PAC PKB Kec. Tawangharjo, Grobogan, serta penghubung ke <i>Kyai</i> UA.
<i>Kyai</i> FTH		✓	<i>Kyai</i> di Ponpes MBL Tanggungharjo, Grobogan.
<i>Kyai</i> UA		✓	Tokoh agama di Grobogan
Ust. Y		✓	Tokoh agama di Grobogan
<i>Kyai</i> MZ		✓	Tokoh agama di Grobogan
<i>Kyai</i> MNR		✓	Tokoh agama di Grobogan
<i>Kyai</i> MTZ		✓	Guru <i>Kyai</i> FTH
MWD		✓	Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)
<b>Perempuan</b>			
Sri Sumarni	✓		Ketua DPC PDIP Grobogan
LY		✓	<i>Nyai</i> di Ponpes Al-MR Kec. Ngaringan, Grobogan, serta Ketua Cabang Muslimat NU Grobogan
<i>Nyai</i> FTH		✓	Istri <i>Kyai</i> FTH
<b>Penyaringan</b>			
<b>Laki-laki</b>			
AS	✓		Sekretaris DPC PDIP Grobogan
YO	✓		Tim Desk Pilkada DPC PDIP Grobogan
BGD	✓		Tim Desk Pilkada DPD PDIP Jateng
BW	✓		Ketua DPD PDIP Jateng
AB	✓		Pengurus DPD PDIP Jateng
GYF	✓		Pengurus DPW PKB Jateng
GJP	✓		Pengurus DPP PDIP Jateng
<b>Perempuan</b>			
Sri Sumarni	✓		Ketua DPC PDIP Grobogan
AW	✓		Ketua Desk Pilkada DPD PDIP Jateng
NNK	✓		Tim Desk Pilkada DPD PDIP Jateng
<b>Penetapan</b>			
<b>Laki-laki</b>			
TJK	✓		Fungsionaris PDIP
IMS	✓		Fungsionaris PDIP, Anggota DPR RI
<b>Perempuan</b>			
Sri Sumarni	✓		Ketua DPC PDIP Grobogan
ENS	✓		Fungsionaris PDIP, Anggota DPR RI

Sumber: dibuat oleh penulis



**Gambar 1.** Visualisasi Jaringan Sri Sumarni dalam Penjaringan Calon Bupati Grobogan pada Pilkada Langsung 2015

Sumber : diolah oleh penulis.



**Gambar 2.** Visualisasi Jaringan Chusnunia dalam Penjaringan Calon Bupati Lampung Timur pada Pilkada Langsung 2015

Sumber: diolah oleh penulis.

**Tabel 4.** Profil Aktor dalam Kandidasi Chusnunia Chalim pada Pilkada Langsung 2015 di Lampung Timur

<b>Penjaringan</b>			
<b>Nama Inisial</b>	<b>Aktor Formal</b>	<b>Aktor Informal</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Laki-Laki</b>			
AF	✓		Ketua Desk Pilkada DPC PKB Lampung Timur /Wakil Ketua DPC PKB Lampung Timur/Anggota DPRD Kab. Lampung Timur
AB	✓		Desk Pilkada DPC PKB Lampung Timur/Bendahara DPC PKB Lampung Timur/Anggota DPRD Kab. Lampung Timur
SHM	✓		Sekretaris DPC PKB Lampung Timur/Desk Pilkada DPC PKB Lampung Timur
NJ	✓		Desk Pilkada DPC PKB Lampung Timur/Wakil Sekretaris DPC PKB Lampung Timur
<i>Kyai IZ</i>		✓	Ketua Tanfidziah NU Lampung Timur
<i>Kyai CJ</i>		✓	Khatib Syuriah NU Lampung Timur
<i>Kyai NW</i>		✓	Wakil Rois Syuriah NU Lampung Timur
<i>Kyai MS</i>		✓	Rois NU Lampung Timur
HIS		✓	Muhtasyar NU Lampung Timur
KSH		✓	MWC NU Probolinggo
OR	✓		Sekretaris DPW PKB Prov. Lampung/Desk Pilkada DPW PKB Prov. Lampung
TR	✓		Desk Pilkada DPW PKB Prov. Lampung/Anggota DPRD Prov. Lampung
KB	✓		Desk Pilkada DPW PKB Prov. Lampung/Anggota DPRD Prov. Lampung
MZ	✓		Ketua DPW PKB Prov. Lampung/Anggota DPR RI
MB	✓		Desk Pilkada DPP PKB
ZB	✓		Anggota DPRD Lampung Timur/Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Timur/Calon Wakil Bupati Lampung Timur
<b>Perempuan</b>			
Chusnunia	✓		Wakil Sekjen DPP PKB/Calon Bupati Lampung Timur
ESN	✓		Ketua DPC PKB Lampung Timur/Desk Pilkada DPC PKB Lampung Timur/Anggota DPRD Kab. Lampung Timur
RRA	✓		Wakil Ketua DPC PKB Lampung Timur/Fatayat NU Lampung Timur
<b>Penetapan</b>			
<b>Laki-Laki</b>			
BS	✓		Ketua Desk Pilkada DPP PKB
MB	✓		Desk Pilkada DPP PKB
HW	✓		Desk Pilkada DPP PKB Korwil Sumatera
KB	✓		Desk Pilkada DPW PKB Prov. Lampung/Anggota DPRD Prov. Lampung
MZ	✓		Ketua DPW PKB Prov. Lampung/Anggota DPR RI
ZB	✓		Calon Wakil Bupati Lampung Timur/anggota DPRD Lampung Timur/Ketua DPC Demokrat Lampung Timur
MI	✓		Ketua Umum DPP PKB
AKK	✓		Sekjen DPP PKB
<b>Perempuan</b>			
Chusnunia	✓		Wakil Sekjen DPP PKB/Calon Bupati Lampung Timur

Sumber: Dibuat oleh penulis.

**Tabel 5.** Strategi dan Jaringan Sri Sumarni dan Chusnunia Chalim dalam Kandidasi di Pilkada Langsung 2015

Sri Sumarni di Grobogan	Chusnunia Chalim di Lampung Timur
<b>STRATEGI</b>	
<p><b>Strategi Sri Sumarni: “tertius iungens”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Karena Sri mampu menghubungkan individu yang sudah saling kenal ke dalam sebuah jaringan sosial dan kerjasama politik baru yang menguntungkan dirinya. Misalnya Sri Sumarni datang ke rumah NWB meminta agar kader PKB EM (sekretaris DPC PKB Grobogan, anggota DPRD Grobogan) diperbolehkan mendampinginya sebagai calon wakil bupati. Komunikasi pro-aktif Sri dilakukan tidak hanya dengan NWB tetapi juga dengan EM. NWB mengendalikannya NU kultural untuk keuntungan Sri.</li> <li>➢ Selain dengan PKB sebagai koalisi utama, Sri terus menjalankan strategi sebagai “tertius iungens” untuk membangun koalisi elit parpol lain pendukungnya (Hanura, PAN)</li> </ul>	<p><b>Strategi Chusnunia Chalim “tertius iungens”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sebagai bakal calon yang memang diminta untuk mencalonkan maka Chusnunia tidak memiliki strategi khusus untuk menembus elit partai. Yang ia lakukan pada tahap penjaringan adalah berkomunikasi dengan pengurus pusat yakni Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB dan Abdul Kadir Karding, Sekjen DPP PKB untuk meminta pertimbangan.</li> <li>➢ Sosok Chusnunia mampu menyatukan atau menghubungkan aktor-aktor PKB dan NU yang pada pilkada-pilkada sebelumnya terpecah-pecah dukungannya. Berdasarkan keterangan IZ, pada Pilkada sebelumnya suara PKB dan NU tidak satu.</li> </ul>
<b>JARINGAN</b>	
<p><b>Inisiatif:</b> Sri Sumarni <b>aktif</b> mencalonkan diri.</p>	<p><b>Inisiatif:</b> Chusnunia Chalim <b>cenderung pasif</b>, dicalonkan oleh aktor-aktor lain.</p>
<p><b>Sentralitas Sri Sumarni dan aktor lain dalam penjaringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ (1) Sentralitas tingkatan: <i>degree centrality</i> (siapa aktor yang paling banyak dihubungi (<i>indegree</i>) dan siapa aktor yang paling banyak menghubungi (<i>outdegree</i>)). Dalam penjaringan calon bupati Grobogan di Pilkada langsung 2015, Sri merupakan aktor dengan nilai <i>indegree</i> (10) dan <i>outdegree</i> (17) yang tertinggi. Nilai tersebut berarti bahwa pada jaringan tersebut, Sri merupakan aktor yang paling banyak dihubungi, sekaligus yang paling banyak menghubungi aktor lain.</li> <li>➢ Posisi Sri pada struktural kepengurusan partai, yaitu sebagai ketua DPC PDIP Grobogan pada saat menjelang Pilkada langsung 2015. Sri sebagai ketua DPC PDIP, dirinya aktif menghubungi 19 PAC dan DPC untuk memastikan dukungan yang solid dari internal partai. Ia juga banyak dihubungi oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal PDIP, dalam rangka pencalonan bupati Grobogan periode 2015-2020.</li> <li>➢ Sri mengomunikasikan rencana pencalonannya kepada jaringan kepala desa dan jaringan petani. Misalnya para pemilik kios pupuk yang tersebar di Grobogan (280 Gapoktan) dan 19 KPL di Grobogan.</li> <li>➢ Sri menjadi satu-satunya politisi perempuan yang mendaftar dalam proses penjaringan PDIP sebagai bakal calon bupati Grobogan pada Pilkada langsung 2015. Tidak ada calon lain yang berani mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui PDIP, di mana tiga politisi lainnya mendaftar dalam penjaringan sebagai bakal calon wakil bupati.</li> </ul>	<p><b>Sentralitas Chusnunia Chalim dan aktor lain dalam penjaringan:</b></p> <p>(1) Sentralitas tingkatan: pada tahap penjaringan aktor dengan tingkatan (<i>degree</i>) tertinggi adalah Chusnunia dengan nilai <i>in degree</i> adalah 9. Angka ini menunjukkan bahwa ia dihubungi oleh 9 aktor dalam jaringan. Relasi yang terbentuk antara Chusnunia dengan aktor-aktor di PKB dan PCNU dikarenakan keduanya sudah satu suara untuk mengusungnya, sehingga kontak yang dilakukan adalah untuk meminta kesediaan Chusnunia dicalonkan menjadi calon bupati Lampung Timur. Adapun nilai <i>outdegree</i> Chusnunia hanya 3. Ini menunjukkan bahwa Chusnunia tidak begitu aktif menghubungi banyak aktor pada tahap penjaringan. Berdasarkan keterangan Chusnunia, ia hanya menghubungi aktor di tingkat pusat saja dan calon wakil bupati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Selain Chusnunia, posisi aktor yang juga penting adalah ESN yang saat itu merupakan Ketua DPC PKB Lampung Timur. Dalam proses kandidasi Chusnunia justru ESN-lah aktor yang paling aktif menjalin komunikasi dan konsolidasi di internal partai. Posisinya yang sentral dalam struktur kepengurusan partai, aktif dalam menjalin relasi dengan aktor-aktor lain baik di DPC, DPW maupun NU. Pada saat penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan oleh tim desk pilkada DPC PKB, ESN dihubungi oleh 8 aktor (<i>in degree</i>) dan menghubungi 10 aktor (<i>out degree</i>) yang ada dalam jaringan. Aktor-aktor tersebut merupakan elit PKB dan elit informal yang dalam hal ini adalah <i>kyai-kyai</i> NU yang memang memiliki peran penting dalam proses pengusungan Chusnunia</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ (2) sentralitas kedekatan, terdiri dari keluar (<i>outcloseness</i>) yang menghitung kedekatan dari aktor yang menghubungi aktor lain, serta kedekatan ke dalam (<i>incloseness</i>) yang menghitung kedekatan dari aktor-aktor yang dihubungi aktor lain. Semakin rendah nilai kedekatan, maka semakin kecil jarak aktor untuk menghubungi aktor lain, yang berarti bahwa semakin dekat jarak antara aktor dengan aktor lain dalam jaringan. Sri adalah aktor yang memiliki nilai sentralitas kedekatan terendah dengan nilai <i>outcloseness</i> sebesar 39 dan nilai <i>incloseness</i> sebesar 100. Sri adalah aktor yang paling memiliki kedekatan dengan aktor-aktor lain dalam jaringan. Ia dapat diterima dan mampu untuk menjalin relasi langsung dengan aktor-aktor lain dari berbagai kalangan tanpa perlu banyak perantara.</li> <li>➤ (3) Sentralitas keperantaraan (<i>betweenness centrality</i>). Aktor dengan nilai sentralitas keperantaraan yang paling tinggi dianggap sebagai aktor terpenting dalam suatu jaringan. Sri memiliki nilai <i>betweenness</i> tertinggi yaitu sebesar 239.833. Nilai tersebut menjelaskan bahwa Sri adalah aktor yang dapat memperantarai sejumlah aktor di tingkat lokal yang terlibat pada saat tahap penjurangan calon bupati Grobogan di Pilkada langsung 2015. NWB (Ketua DPC PKB Grobogan) adalah aktor selain Sri yang juga mempunyai nilai <i>betweenness</i> tinggi dalam jaringan, yaitu sebesar 116.833 karena dia berperan menghubungkan dengan <i>kyai-kyai</i> NU kultural.</li> <li>➤ (4) Sentralitas <i>eigenvektor</i> (<i>eigenvector centrality</i>): seberapa penting aktor lain yang berjejaring dengan seorang aktor. Nilai sentralitas <i>eigenvektor</i> ini berkisar antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai <i>eigenvektor</i> seorang aktor, semakin penting atau populer aktor-aktor lain yang berjejaring atau berelasi dengan aktor tersebut. Sri adalah aktor dengan nilai <i>eigenvektor</i> yang paling tinggi, yaitu sebesar 0.578. Dengan demikian dapat dikatakan ia merupakan aktor yang paling banyak memiliki relasi dengan aktor-aktor penting lain dalam jaringan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ (2) Sentralitas kedekatan (<i>closeness</i>), terbagi menjadi kedekatan keluar (<i>outcloseness</i>) yang menghitung kedekatan dari aktor yang menghubungi aktor lain, serta kedekatan ke dalam (<i>incloseness</i>) yang menghitung kedekatan dari aktor-aktor yang dihubungi aktor lain. ESN adalah aktor yang memiliki nilai kedekatan terbaik, kedekatan keluarnya (<i>outcloseness</i>) adalah 31. Nilai ini menunjukkan bahwa ESN adalah aktor yang paling memiliki kedekatan dengan aktor-aktor lain dalam jaringan. Ia dapat diterima dan mampu untuk menjalin relasi langsung dengan aktor-aktor lain tanpa melalui banyak perantara.</li> <li>➤ (3) Sentralitas keperantaraan. Aktor yang menempati posisi sentralitas keperantaraan adalah <i>Kyai</i> IZ dengan nilai 49.500. Mengapa posisi <i>Kyai</i> IZ menjadi penting? Karena tanpa kehadirannya, maka relasi antara antar aktor menjadi terhambat. Perannya sebagai Ketua Tanfidziyah NU Lampung Timur menjadikannya sebagai perantara dalam jaringan yang menghubungkan elit DPC PKB dan NU.</li> <li>➤ (4) Sentralitas <i>eigenvektor</i> memiliki nilai normal 0 sampai 1. Aktor yang memiliki nilai tertinggi, berarti memiliki <i>eigenvektor</i> yang tinggi juga. Dalam konteks jaringan tersebut, aktor yang menjadi sentralitas <i>eigenvektor</i> adalah Chusnunia dengan nilai 0.390. Hal ini menunjukkan bahwa ia merupakan aktor yang paling banyak memiliki relasi dengan aktor-aktor penting lain dalam jaringan. Posisinya sebagai pengurus partai di tingkat pusat memberikan kemudahan akses untuk menjalin relasi dengan Ketua Umum maupun Sekjen DPP PKB sehingga pada akhirnya mendapatkan rekomendasi. Sebagai Koordinator PKB wilayah Lampung sekaligus anggota legislatif, Chusnunia telah membangun jejaring politik sejak tahun 2007 di daerah.</li> </ul>
--	--

<p><b>Penggunaan Jaringan perempuan dalam tiga tahap kandidasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penjaringan:</b> Nyai LY untuk memastikan mendapat dukungan dari para tokoh NU mengingat Grobogan adalah basis kuat NU. Sri melakukannya melalui jaringan suaminya yang masih memiliki hubungan keluarga dengan almarhum pemilik pondok pesantren Al-MR Kecamatan Ngaringan Grobogan. Nyai LY (istri dari almarhum <i>kyai</i> pemilik pondok pesantren Al-MR) berperan sentral dalam memobilisir dukungan Muslimat NU untuk kemunculan Sri.</li> <li>➤ <b>Penyaringan:</b> melalui AW sebagai ketua tim Desk Pilkada DPD PDIP Jawa Tengah, sehingga menjadi hal yang wajar jika ia menjadi aktor penting dalam jaringan yang banyak dihubungi pada tahap penyaringan calon bupati Grobogan di Pilkada langsung 2015. Sri memiliki strategi tersendiri mengamankan proses verifikasi tersebut, dengan bantuan YO yang berasal dari pengurus PDIP Grobogan dalam memastikan berkas-berkasnya lengkap di tahap penyaringan.</li> <li>➤ <b>Penetapan:</b> melalui ENS, fungsionaris PDIP yang menjadi anggota DPR RI dari dapil 3 dimana salah satu wilayahnya mencakup Kabupaten Grobogan. Sehingga saat Pilkada 2015, ENS membantu menyampaikan informasi situasi di lapangan yang kuat mendukung Sri supaya rekomendasi DPP PDIP jatuh pada Sri. Hubungan yang saling menguntungkan ini kemudian berubah menjadi dukungan ENS bagi Sri.</li> <li>➤ Sentralitas Sri dalam empat ukuran sentralitas jaringan sebagaimana disebut di atas, juga terjadi pada tahap penyaringan dan penetapan.</li> </ul>	<p><b>Penggunaan Jaringan perempuan dalam dua tahap kandidasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penjaringan:</b> nyatanya ada dua perempuan yang menduduki posisi aktor sentral. Chusnunia sebagai bakal calon kepala daerah menempati posisi sentralitas tingkatan dan <i>eigenvector</i>. Sedangkan ESN menjadi aktor yang menempati posisi sentralitas kedekatan. Selain menempati posisi sentralitas kedekatan, ESN juga menjadi sosok yang memiliki nilai sentralitas tingkatan tinggi setelah Chusnunia.</li> <li>➤ <b>Penetapan:</b> tidak ada peran perempuan dalam tahap penetapan Chusnunia. Dua aktor laki-laki yang berperan adalah BS dan MB dengan nilai <i>outclosnes</i> 12. Keduanya merupakan tim desk pilkada DPP PKB yang berperan penting dalam proses pengurusan administrasi maupun <i>fit and proper test</i> di DPP. MB juga menjadi aktor sentralitas keperantaraan dengan nilai 9.000 karena selain berinteraksi dengan aktor-aktor di DPP, ia juga memperantarai relasi aktor DPW PKB Provinsi Lampung yakni KB.</li> </ul>
<p><b>Aktor sentral dalam Struktur Jaringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sri sebagai aktor sentral dalam jaringan.</li> <li>➤ Sri merupakan aktor yang paling banyak mempunyai relasi dengan aktor-aktor penting dalam proses kandidasi, serta menjadi aktor perantara yang menghubungkan satu aktor dengan aktor lain dalam jaringan.</li> </ul>	<p><b>Aktor sentral dalam Struktur Jaringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tidak hanya berpusat pada Chusnunia saja.</li> <li>➤ Terdapat setidaknya 2 orang aktor penting selain Chusnunia yaitu ESN dan <i>Kyai</i> IZ.</li> </ul>

<p><b>Struktur Jaringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Kepadatan jaringan:</i> struktur jaringan yang terbentuk cenderung bersifat tidak rapat dimana ada banyak aktor yang satu sama lain tidak saling berinteraksi, melainkan terhubung karena adanya perantara oleh aktor lain. Sri merupakan aktor yang begitu aktif menjalin interaksi dengan aktor-aktor dari banyak kalangan dan memperantarai aktor-aktor yang tidak saling terhubung dalam jaringan pada tahap penjaringan tersebut.</li> <li>➤ <i>Tidak terdapat fragmentasi</i> pada jaringan yang terbentuk. Model jaringan Sri Sumarni dalam kandidasi memperlihatkan posisi sentral Sri di mana semua aktor formal maupun informal terhubung dan berpusat pada Sri.</li> </ul>	<p><b>Struktur Jaringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Kepadatan jaringan:</i> struktur jaringan yang terbentuk cenderung menggambarkan bahwa interaksi antar aktor pada saat penjaringan tidaklah terlalu rapat, namun lebih rapat dibandingkan dengan kepadatan jaringan Sri. Karena aktor tidak berinteraksi dengan semua aktor yang ada dalam jaringan. Interaksi yang intensif antar aktor hanya dilakukan oleh beberapa orang.</li> <li>➤ <i>Terdapat fragmentasi</i> pada jaringan yang terbentuk. Model jaringan Chusnunia Chalim menggambarkan bahwa aktor penting dalam jaringan tidak menumpuk di satu aktor saja tapi tersebar di beberapa aktor.</li> </ul>
<p><b>Relasi Gender:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Struktur jaringan didominasi laki-laki baik dalam struktur (aktor formal) internal PDIP maupun dalam koalisi partai yang mendukung kandidasi Sri (PKB, PAN, Hanura), dan aktor informal.</li> <li>➤ Meski didominasi oleh laki-laki namun Sri memiliki peran sentral dalam kandidasi. Sri mampu menggerakkan aktor-aktor di sekelilingnya untuk keuntungannya.</li> </ul>	<p><b>Relasi Gender:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jika melihat komposisi aktor-aktor yang terlibat dalam proses penjaringan tampak didominasi oleh laki-laki. Hanya ada 3 perempuan dalam jaringan tersebut (Chusnunia, ESN, RRA).</li> <li>➤ Meski didominasi oleh laki-laki namun kedua perempuan (Chusnunia dan ESN) mampu menggerakkan aktor-aktor di sekelilingnya untuk kandidasi Chusnunia.</li> </ul>

Sumber: dibuat oleh penulis

Dari tabel di atas, nampak bahwa terdapat *perbedaan* dan *kesamaan* dalam strategi dan jaringan perempuan dalam kandidasi yang dipakai oleh Sri Sumarni di Grobogan dan Chusnunia Chalim di Lampung Timur. Terdapat tiga persamaan strategi dan jaringan kedua perempuan politisi dalam kandidasi yaitu:

*Pertama*, keduanya sama-sama menggunakan strategi “*tertius iungens*” untuk menghubungkan aktor-aktor formal maupun informal untuk menjalin kerjasama politik baru yang menguntungkan dirinya.

*Kedua*, adalah pada penggunaan perempuan dalam posisi kunci dalam model jaringan yang dibentuknya. Keduanya sama-sama menggunakan perempuan dalam tiga tahap kandidasi (penjaringan, penyaringan, penetapan) atau salah satu tahapnya. Hal ini karena Sri Sumarni memiliki kedekatan dengan ENS karena ENS adalah anggota DPR RI dapil Grobogan sehingga pada saat Pilkada 2015, ENS menjadi pihak yang menginformasikan ke DPP terkait situasi di lapangan yang kuat mendukung Sri. Lalu mereka bersama-sama menduduki posisi

struktural partai politik PDIP (Sri Sumarni sebagai Ketua DPC PDIP Grobogan dan ENS adalah anggota DPR RI). Sehingga kedekatan emosional sudah terbina sejak lama. Sementara itu AW karena posisinya adalah ketua desk Pilkada DPD PDIP Jawa Tengah maka dia membantu mengkomunikasikan Sri kepada elit parpol di tingkat DPD. Sementara itu, ESN dalam kasus Chusnunia Chalim berinteraksi karena posisi mereka sebagai perempuan politisi sama-sama berkarir di PKB. Jika Chusnunia adalah anggota DPR RI dari PKB dari Dapil Lamtim dan fungsionaris DPP PKB Pusa. Maka ESN adalah Ketua DPC PKB Lampung Timur maupun wakil ketua DPRD Kab.Lampung Timur. Sehingga kedekatan mereka adalah sosiologis dan mutualisme.

*Ketiga*, adalah relasi gender yang sama. Meskipun laki-laki mendominasi struktur jaringan, namun tidak berarti adanya relasi gender yang tidak seimbang. Modal individu dan modal sosial Sri Sumarni tak tertandingi yang dimiliki oleh Sri Sumarni, maka dirinya justru mampu menjadi pemain sentral yang mempengaruhi dan



menggerakkan pilihan-pilihan politik mereka bagi keuntungan politik Sri. Begitupun dengan sosok Chusnunia yang menjadi magnet (karena modal individu dan modal sosial yang kuat) dan dengan dukungan sosial dan politik ESN maka kandidasi Chusnunia berjalan lancar.

Namun demikian, terdapat empat perbedaan dari jaringan kedua perempuan tersebut yaitu:

*Pertama*, dari segi inisiatif di mana dalam kasus Sri Sumarni memang memiliki inisiatif dan aktif untuk menjadi bakal calon kepala daerah dari PDIP. Sementara itu, Chusnuni Chalim memang semula tidak mencalonkan diri, tetapi diminta atau dicalonkan oleh para aktor PKB. *Kedua* dari segi sentralitas perempuan politisi tersebut dan aktor dalam penjaringan (tahap awal paling krusial dalam kandidasi). Pada kasus Sri Sumarni di Grobogan, ia merupakan aktor sentral yang berperan aktif menghubungi banyak aktor dan sekaligus juga dihubungi oleh banyak aktor dalam tahap penjaringan. Sri Sumarni memegang kendali penuh dalam tahap penjaringan dengan aktif mengkonsolidasi dukungan internal PDIP, menghubungi jaringan para kepala desa dan jaringan petani. Hal ini terkonfirmasi dari nilai empat sentralitas Sri dengan peran dominan dalam *sentralitas tingkatan, sentralitas kedekatan, sentralitas keperantaraan, serta sentralitas eigenvektor*. Sementara itu, pada kasus Chusnunia Chalim di Lampung Timur, ia tidak menjadi aktor sentral dalam penjaringan. Perannya cenderung pasif, dan terdapat dua aktor lainnya yaitu ESN dan *Kyai IZ* yang juga punya peran sentral mengkonsolidasikan pencalonan Chusnunia di PKB dan NU.

*Ketiga*, adalah pada aktor sentral dalam struktur jaringan. Pada kasus Sri Sumarni, ia menjadi aktor sentral dalam struktur jaringan. Sementara itu pada kasus Chusnunia, terdapat dua aktor sentral dalam struktur jaringan selain Chusnunia, yaitu ESN dan *Kyai IZ*.

*Keempat*, adalah pada struktur jaringan. Dalam kasus Sri Sumarni, kepadatan jaringan atau struktur jaringan yang terbentuk cenderung bersifat tidak rapat dimana ada banyak aktor yang satu sama lain tidak saling berinteraksi, melainkan terhubung karena adanya perantara oleh aktor lain. Sri merupakan aktor yang begitu aktif menjalin interaksi dengan aktor-

aktor dari banyak kalangan dan memperantarai aktor-aktor yang tidak saling terhubung dalam jaringan pada tahap penjaringan tersebut. Selain itu tidak terdapat fragmentasi pada jaringan yang terbentuk. Jaringan Sri Sumarni dalam kandidasi memperlihatkan posisi sentral Sri di mana semua aktor formal maupun informal terhubung dan berpusat pada Sri. Sementara itu pada kasus Chusnunia Chalim, struktur jaringan yang terbentuk cenderung menggambarkan bahwa interaksi antar aktor pada saat penjaringan tidaklah terlalu rapat. Karena aktor tidak berinteraksi dengan semua aktor yang ada dalam jaringan. Interaksi yang intensif antar aktor hanya dilakukan oleh beberapa orang. Selain itu, terdapat fragmentasi pada jaringan yang terbentuk. Fragmentasi tersebut menggambarkan bahwa aktor penting dalam jaringan tidak menumpuk di satu aktor saja tapi tersebar di beberapa aktor.

## Penutup

*Pertama*, modal individu (finansial, ketrampilan sosial, latar belakang keluarga) dan modal sosial yang kuat menjadi dasar bagi kedua perempuan politisi untuk menembus kandidasi. Keduanya mampu membentuk jaringan kuat melalui berbagai lapisan aktor (formal dan informal) sehingga dapat dicalonkan pada Pilkada langsung yaitu Sri Sumarni via PDIP di Grobogan, dan Chusnunia Chalim via PKB di Lampung Timur.

*Kedua*, kajian ini menunjukkan bahwa kandidasi sangat penting dipahami dalam konteks jaringan yaitu kemampuan perempuan politisi memahami aktor-aktor kunci yang harus dijalin, diajak berkomunikasi dan menjaga hubungan bertahun-tahun untuk mendukungnya dalam kandidasi. Seorang politisi perempuan dengan modal individu dan modal sosial yang hebat, tetapi tidak memiliki kemampuan masuk dan “ber-strategi” ke dalam jaringan aktor-aktor, maka tidak akan dapat menembus kandidasi.

*Ketiga*, jaringan perempuan politisi yang ditemukan dan dianalisis dalam kajian ini memiliki pola yang sama yakni kedua perempuan politisi merupakan kader partai dan membangun karir di parlemen. Keduanya mengawali karir politika sebagai anggota legislatif lokal (DPRD

Grobogan untuk Sri Sumarni) maupun nasional (anggota DPR RI dari PKB untuk Chusnunia Chalim). Terpilih sebagai anggota legislatif terlebih dahulu mengkonfirmasi popularitas dan akseptabilitas keduanya, sehingga menjadikan posisi tawar mereka tinggi di internal partai politik maupun luar partai politik, untuk kemudian berkompetisi dalam Pilkada langsung.

*Keempat*, jaringan Sri Sumarni dalam kandidasi adalah: Sri memegang peran sentral yang aktif berkomunikasi dengan berbagai aktor sejak tahap penjaringan, menggunakan strategi “tertius iungens” untuk menjalin kerja sama antar aktor, menggunakan perempuan dalam posisi kunci dalam jaringan yang dibentuk, struktur jaringan tidak terfragmentasi, dan Sri yang mengendalikan jaringan meskipun struktur jaringan didominasi laki-laki.

*Kelima*, jaringan Chusnunia Chalim dalam kandidasi adalah: Chusnunia pasif dalam tahap penjaringan, menggunakan strategi “tertius iungens” untuk menjalin kerja sama antar aktor, menggunakan perempuan dalam posisi kunci, tidak hanya Chusnunia yang menjadi aktor sentral yang mempengaruhi dan menggerakkan pilihan-pilihan politik aktor karena terdapat peran perempuan lainnya (ESN), struktur jaringan terfragmentasi, dua perempuan (Chusnunia dan ESN) mampu memainkan jaringan meskipun struktur jaringan didominasi laki-laki.

*Keenam*, kajian ini menggarisbawahi sulitnya perempuan untuk dicalonkan dalam Pilkada langsung karena membutuhkan *effort* yang luar biasa dan butuh puluhan tahun (minimal 10 tahun) untuk mengkonsolidasikan modal individu dan modal sosial untuk memperoleh dukungan. Hal ini sejalan dengan gagasan agar para politisi perempuan yang muncul dalam Pilkada langsung bukan politisi instan, namun mereka yang memiliki rekam jejak sosial dan pengkaderan dalam partai politik yang sudah teruji. Artinya temuan kajian ini semakin memperkuat pentingnya mendorong banyak perempuan politisi yang muncul dalam Pilkada langsung karena kredibilitas, modal individu dan modal sosial yang kuat, dan bukan hanya karena “ikatan keluarga” atau “faktor kekerabatan” semata sebagaimana yang selama ini banyak muncul.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adams, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Yogyakarta: Qalam, 1993.
- Alfian. *Ideologi, Idealisme dan Integrasi Nasional*, dalam Yahya Muhaimin, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1976.
- Amal, Ichlasul, dan Budi Winarno. *Metodologi Ilmu Politik*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM.
- Ballington, Julie, and Richard E. Matland, *Political Parties and Special Measures: Enhancing Women's Participation in Electoral Processes*. New York, 2004.
- Blackburn, Susan, Bianca J Smith and Siti Syamsiyatun. “Introduction”, dalam *Indonesian Islam in A New Era: How Women Negotiate Their Muslim Identities*, ed. Susan Blackburn, Bianca J. Smith, Siti Syamsiyatun. Clayton: Monash University Press, 2008.
- Bottomore, T.B., *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute. 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1986
- Burt, Ronald S. *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. USA: Harvard University Press, 1995.
- Burt, Ronald S. *Brokerage & Closure: An Introduction to Social Capital*. New York, USA: Oxford University Press, 2005.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, ed. *Kebangkitan Perempuan Tabanan Dalam Politik Lokal*. Jakarta: Mahara Publishingm 2016.
- Dewi, Kurniawati Hastuti, ed. *Perempuan Pemimpin Politik Lokal: Faktor Kekerabatan dan Demokratisasi Lokal (Studi Kasus di Tangerang Selatan dan Indramayu)*. Dalam proses penerbitan.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*. Singapore: NUS Press and Kyoto University Press, 2015.
- Eriyanto, *Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam Kajian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Haris, Syamsuddin. ed. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia, 2005.

- Hazan, Reuven Y. "Candidate Selection" dalam *Comparing Democracies 2*, ed. Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi dan Pippa Norris., London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Ltd, 2002.
- Katz, Richard S. dan William Crotty. *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications. 2006.
- Keller, Franziska Barbara. "Networks of Power: Using Social Network Analysis to Understand Who Will Rule and Who is Really in Charge in the Chinese Communist party", laporan kajian , draft Juli 2015.
- Keller, Suzanne. *Penguasa dan Kekompok Elite: Peranan Elite Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Knoke, David and Song Yang. *Social Network Analysis (2<sup>nd</sup> edition)*. LA, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication. 2008
- Krook, Mona Lena, and Fiona Mackay. "Introduction: Gender, Politics, and Institutions" dalam *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*, ed. Mona Lena Krook and Fiona Mackay. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Lin, Nan. "Building a Network Theory of Social Capital" dalam *Social Capital: Theory and Research*, ed. Nan Lin, Karen Cook, Ronald S. Burt. New York: Aldine De Gruyter, 2001.
- Lin, Nan. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Maharddhika. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), "Perempuan Calon Kepala Daerah di Pilkada 2017". Jakarta, 28 November 2016.
- Matland, Richard E., and Kathleen A. Montgomery. *Women's Access to Political Power in Post Communist Europe*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Mosca, Gaetano. "The Ruling Class" dalam *Elite dan Masyarakat*, ed. T.B Bottomore. Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.
- Norris, Pippa and Joni Lovenduski. *Political Representation and Recruitment: Gender, Race and Class in The British Parliament*. Cambridge & New York: Cambridge University Press. 1995.
- Olivier Serrat, *Social Network Analysis* (Manila: Asian Development Bank, 2009), <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27633/social-network-analysis.pdf>
- Pareto, Vilfredo. "The Main and Society" dalam *Elite dan Masyarakat*, ed. T.B Bottomore. Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). "Jalan Terjal Perempuan Kepala Daerah Terpilih: Potret Keterpilihan Perempuan dan Tantangan Lahirkan Kebijakan Perempuan". Jakarta, 20 Desember 2015.
- Pusat Kajian Politik. *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Loka*. Jakarta: Pusat Kajian Politik LIPI & Konrad Adenauer Stiftung, 2012.
- Ranney, Austin. *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
- rumahpemilu.org. *Peta Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2014: Perempuan dalam Partai Politik, Pemilu, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif*. Jakarta: rumahpemilu.org atas dukungan Perludem, 2013.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff; alih bahasa Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Serrat, Olivier. *Social Network Analysis*. Manila: Asian Development Bank, 2009.
- Sargent, Lyman Tower. *Ideologi – Ideologi Politik Kontemporer*. Alih Bahasa AR Henry Sitanggang. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Scott, John. *Social Network Analysis a Handbook*. London: Sage Publication, 1987. <http://soc.sagepub.com/content/22/1/09.short>, (diakses pada 25 November 2016)
- Tim Peneliti Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga (UNAIR). "Perempuan dalam Pemilu: Kajian tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara", Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011.
- Tim Pusat Kajian Politik LIPI. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia* Jakarta: KPK RI bekerjasama dengan P2Politik LIPI, 2016.
- Wardani, Sri Budi Eko, dan Yolanda Panjaitan, Wawan Ichwanuddin, et.al, *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*. Jakarta: Puskapol Fisip UI, 2013.
- Wulandari, Lia, Khoirunnisa Agustyati, et.al. *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014* Jakarta: Perludem dan The Asia Foundation, 2014.

## Jurnal

- Abrams, Kathryn. "From Autonomy to Agency: Feminist Perspectives on Self-Direction," *William & Mary Law Review* Vol. 40, no. 3 (1999).
- Cheng, Christine., and Margit Tavits, "Informal Influences in Selecting Female Political Candidates", *Political Research Quarterly*, vol. 64, no. 2 (2011): 460-471.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. "Profiles, Statuses and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections," *Indonesian Feminist Journal*, vol.3, no. 1 (August 2015): 47-52.
- Emirbayer, Mustafa,m and Jeff Godwin, *Network Analysis, Culture and the Problem of Agency*. American Journal of Sociology, vol.99, no.6 (1994).
- Harding, Sandra. "The Method Question". *Hypatia* vol. 2, no. 3, (Autumn 1987).
- Hussain, Basharat., & Amir Zada Asad. "A Critique on Feminist Research Methodology." *Journal of Politics and Law*, vol. 5, no. 4.
- Krook, Mona Lena. "Beyond Suplay and Demand: A Feminist-institutionalist Theory of Candidate Selection", *Political Research Quarterly*, vol. 63, no. 4 (2010): 707-720.
- Laporan Utama, "Transkrip Diskusi Representasi Politik Perempuan: Sekadar Warna atau Turut Mewarnai", *Jurnal Sosial Demokrasi*, Edisi 6, tahun 2, (Juni - Agustus 2009).
- Lingo, Elizabeth Long., and Siobhan O'Mahony, "Nexus Work: Brokerage on Creative Projects", *Administrative Science Quarterly* 55, (2010): 47-81.
- Misiyah, "Pengalaman Perempuan: Sumber Pengetahuan yang Membebaskan", *Jurnal Perempuan*, no. 48 (2006).
- Obstfeld, David, "Social Networks, The Tertius Iungens Orientation, and Involvement in Innovation", *Administrative Science Quarterly* 50, (2005).

## Thesis/Disertasi

- Ekawati, Esty. *Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2009*. Tesis Master. Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- El Qudsi, Mohammad Ichlas., *Celah Struktur dan Tertius Gaudens dalam Jaringan Komunikasi Politik: Studi Analisis Struktur Jaringan Komunikasi Politik dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Hebat pada Pilpres 2014*. Disertasi. Depok: FISIP UI, 2016
- S, Gregory, Leo S. "A Social Network Analysis of the Chinese Communist Party's Politburo". Thesis. Monterey: California Naval Postgraduate School, 2013.

## Paper

- Dewi, Kurniawati Hastuti. "The Effect of Concurrent Direct Local Elections on the Political Opportunity of Female Leaders and Prospect of Political Dynasty", paper presented in presented in Biannual International Conference on Indonesian Politics and Government 2015, University of Indonesia, Depok, 2 November 2015.

## Sumber Online

- Komisi Pemilihan Umum. "337 Jumlah Pendaftar Pilkada 2017, 10 daerah Paslon Tunggal", dalam <https://pilkada2017.kpu.go.id/berita/detail/24>.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Agus Sutisna**

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [tisna\\_1965@ymail.com](mailto:tisna_1965@ymail.com).

### **Firman Noor**

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: [firman.noor@yahoo.co.id](mailto:firman.noor@yahoo.co.id).

### **Idil Akbar**

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [idil.akbar@gmail.com](mailto:idil.akbar@gmail.com)

### **Kurniawati Hastuti Dewi**

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [kurniawati.dewi@yahoo.com](mailto:kurniawati.dewi@yahoo.com).

### **Lili Romli**

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: [liliromli.lipi@gmail.com](mailto:liliromli.lipi@gmail.com)

### **M. Fajar Shodiq Ramadhan**

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: [fajarramadhan@ub.ac.id](mailto:fajarramadhan@ub.ac.id).

### **Moch Nurhasim**

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [hasim\\_nur@yahoo.com](mailto:hasim_nur@yahoo.com).

### **Mouliza K.D Sweinstani**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [moulizadonna@gmail.com](mailto:moulizadonna@gmail.com).

### **Romel Masykuri**

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: [romel.masykuri@gmail.com](mailto:romel.masykuri@gmail.com)

### **Ridho Imawan Hanafi**

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel [ridhoimawan@gmail.com](mailto:ridhoimawan@gmail.com).

### **Sri Budi Eko Wardani**

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sbe\\_wardani@yahoo.com](mailto:sbe_wardani@yahoo.com).

### **Sri Yanuarti**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain*. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel [yanuc2000@yahoo.com](mailto:yanuc2000@yahoo.com).

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

